

SKRIPSI

PENDIDIKAN PEMILIH OLEH KPU KOTA MATARAM DALAM PELAKSANAAN PILKADA DIMASA PENDEMIC COVID-19 (Studi Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun Di Kota Mataram)

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Serjana(S1)



OLEH :

FARIDA JULIANI

NIM. 217130101

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERITAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENDIDIKAN PEMILIH OLEH KPU KOTA MATARAM DALAM
PELAKSANAAN PILKADA DIMASA PENDEMIC COVID-19
(Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 Dikota Mataram)**



Disusun dan diajukan Oleh :

FARIDA JULIANI
NIM:217130101

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi Mataram, 12 Agustus 2021

Pembimbing

Pembimbing I

Drs. H. Darmansyah.,M.Si
NIDN.0008075914

Pembimbing II

vRahmad Hidayat.,S.AP.M.AP
NIDN.0822048901



Mengetahui.
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN.0816057902

LEMBAR PENGESAHANSKRIPSI

**PENDIDIKAN PEMILIH OLEH KPU KOTA MATARAM DALAM
PELAKSANAAN PILKADA DIMASA PENDEMIC COVID-19
(Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 Dikota Mataram)**

Disusun dan diajukan Oleh :

FARIDA JULIANI
NIM: 217130101

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 12 Agustus 2021 Dinyatakan
telah memenuhi persyaratan
Menyetujui

Tim Penguji

1. **Drs. H. Darmansyah.M.Si**
NIDN.0008075914

(PU) 

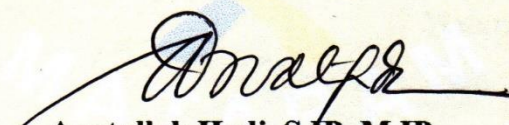
2. **Rahmad Hidayat.,S.AP.M.AP**
NIDN.0822048901

(PP) 

3. **Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP.,M.Si**
NIDN. 0825038303

(PN) 

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini. Saya Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Farida juliani

NIM : 217130101

Alamat: Desa Simu Kec. Maronge Dusun Jeleiti Rt/Rw 015/007

Memang benar skripsi yang berjudul "*Pendidikan pemilih oleh KPU Kota mataram dalam Pelaksanaan Pilkada Di masa Pendemic covid-19 (Studi Kasus Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dikota Mataram)*" asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi dimanapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang dipublikasi, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram. 12 Agustus 2021



FARIDA JULIANI
NIM. 217130101



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641996

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIDA JULIANI
NIM : 211130101
Tempat/Tgl Lahir : SIMU 03 Oktober 1999
Program Studi : Ilmu PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 082 339 637 942
Email : fharida031099@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pendidikan Pemuk oleh KPU Kota Mataram dalam pelaksanaan
pilkada dima pendemi covid-19

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 September 2021
Penulis



FARIDA JULIANI
NIM. 211130101

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

lih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIDA JULIANI
NIM : 217130101
Tempat/Tgl Lahir : SMU 03 Oktober 1999
Program Studi : Ilmu PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082.339.637.992 / farida031099@gmail.com
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pendidikan penuh oleh KPU Kota Mataram dalam pelaksanaan pilkada dimasa pandemic covid-19

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 September 2021

Penulis



FARIDA JULIANI

NIM. 217130101

Mengetahui,
Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.

(Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah karya ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan sebagaimana mestinya, meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan. Proposal Skripsi ini berjudul “ **PENDIDIKAN POLITIK OLEH KPU KOTA MATARAM DALAM PELAKSANAAN PILKADA DIMASA PENDEMIC COVID-19**”. Proposal ini merupakan salah satu kewajiban akademik dalam proses meraih gelar sebagai Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), dan diharapkan dapat memberikan banyak manfaat.

Di sisi lain tercapainya penyusunan Skripsi ini tak terlepas dari kontribusi pihak yang telah banyak membantu, baik dalam segi materil maupun non materil. Untuk itu Penulis wajib dan patut menghaturkan sertamenyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Rasa ucapan terimakasih ini di dedikasikan untuk :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. H. Muhammad Ali. M.SI. selaku Dekan Fakultas Ilmu Soisial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Bapak Ayatullah Hadi.S.IP.,M.IP Selaku Ketua Kaprodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs.H.Darmansyah.M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan dalam menyusun proposal.
5. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP.M.AP selaku Dosen Pembimbing II Penulis Yang Senantiasa Sabar,Dan ikhlas di Sela-sela Kesibukan Beliau Masih Menyempatkan Diri Membimbing Penulis Dalam Mengerjakan Proposal Ini Dari Awal Hingga Akhir.
6. Dosen di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Dan yang paling istimewa saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya.
7. Kedua orang tua Bapak sayaZaeunddin dan mama saya Jamila yang telahmenjadi motivator terhebat, sumberpenyemangathidup saya dan saya tidak pernah bosan mendoakanya, membimbing, menyanyangi, serta tidak pernah letih berjuang utuk membiayain hidup dan pendidikannya. Mereka yang selalu terpati dalam jiwa saya. Terimakasih atas semua pengorbanan,cinta dan kasih sayang yang mampu membuat saya sampai titik ini.
8. Teruntuk Kakak saya Heri Shoriyadi dan orang yang special dalam hidup saya.Terimakasih sudah menjadi patner terbaik saya dari awal saya kulya hingga saat ini dan masih memberikan bimbingan yang luar biasa.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017.

10. Teruntuk teman saya Rahmani, Putri, Martiani, yang selalu menyupport saya.

Terimakasih kasih kalian sudah ada untuk saya dalam senangataupun susah.

11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu.



ABSTRAK

PENDIDIKAN PEMILIH OLEH KPU KOTA MATARAM DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI MASA PANDEMIC COVID-19 (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kota Mataram)

Farida Juliani

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Pendidikan Pemilih adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu tertentu. Pendidikan pemilih penting karena membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Mataram tahun 2020 dan Faktor Penghambat KPU Kota Mataram dalam memberikan Pendidikan Pemilih ke masyarakat maupun kelompok yang berpartisipasi dalam Pemilu. Fokus penelitian ini adalah Langkah-langkah KPU Kota Mataram dalam pelaksanaan Pendidikan Pemilih dan Faktor Penghambat yang mempengaruhi KPU Kota Mataram dalam proses pelaksanaan Pendidikan Pemilih. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data primer data sekunder.

Hasil penelitian ini setelah di laksanakananya Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Mataram pada tahun 2020 dengan Fokus Penelitian pada tahap pelaksanaan Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram di Masa Pandemic Covid 19. Dalam Pelaksanaan Pendidikan Pemilih KPU Kota Mataram melaksanakan proses pendidikan pemilih dengan menyesuaikan aturan yang di berlakukan oleh pemerintah sebagai dampak pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Masa Pandemic Covid 19. Seperti melakukan sosialisasi pendidikan pemilih dengan peserta yang terbatas yaitu maksimal 30 Orang, dengan Harapan agar Masyarakat peserta dalam sosialisasi pendidikan pemilih dapat meneruskan Informasi terkait pendidikan pemilih ke Masyarakat yang lain. Melalui penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram tahun 2020 di tahap proses pendidikan pemilih pada Masa pandemic covid-19, tidak bisa di lakukan dengan maksimal di karenakan pelaksanaanya penuh dengan segala batasan akibat dampak dari pandemic covid-19, hal ini dapat di lihat dari Jumlah Pemilih sebanyak 302.156 Pemilih tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 198.632 Pemilih.

Kata Kunci : Pilkada, Pendidikan Pemilih, KPU Kota Mataram.

ABSTRACT

VOTER EDUCATION BY KPU OF MATARAM CITY IN THE ELECTIONS PROCESS DURING COVID-19 PANDEMIC (Case Study of the Mayor and Deputy Mayor Election in Mataram City, 2020)

Farida Juliani

Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Muhammadiyah University of Mataram

Voter education is an endeavor to impart principles linked to elections and democracy in lives of persons who have met the prerequisites to vote in elections or who may vote in the future. Voter education is critical because it aids election administrators in conducting fair elections. The goal of this research is to determine the Voter Education provided by the KPU of Mataram City during the Mayor and Deputy Mayor Election in Mataram City in 2020, as well as Mataram City KPU's Obstacle Factors in providing Voter Education to the community and citizens participating in the Election. This research focuses on the steps of the KPU in Mataram City in the implementation of Voter Education and the Inhibiting Factors that affect the KPU of Mataram City in the process of implementing Voter Education. This type of research is descriptive qualitative, primary data source secondary data.

The findings of this study were conducted following the Mayor and Deputy Mayor Election Process in the Mataram City in 2020, with a focus on the stage of Voter Education Implementation by the KPU of Mataram City at the Covid 19 Pandemic. During the Implementation of the Election of Mayors and Deputy Mayors in the Covid-19 Pandemic Period, KPU of Mataram City conducted a voter education process by amending the rules set by the Government as a result of the implementation of the Election of Mayors and Deputy Mayors. Conducting voter education socialization with a limited number of participants, such as a maximum of 30 individuals, is one example of its execution. The goal is for the participating communities in voter education socialization to pass on information about voter education to other communities. The implementation of the Pilkada in Mataram City in 2020, at the stage of voter education process during the COVID-19 pandemic, cannot be carried out optimally because the implementation is full of all limitations due to the impact of the Covid-19 pandemic, evidenced by the fact that there are 302,156 voters, but only 198,632 voters exercised their voting rights.

Keywords: Pilkada, Voter Education, KPU Mataram City

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



Humaira, M.Pd
NIDN. 0203048601

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN..... i

LEMBAR PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR..... vi

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 6

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 9

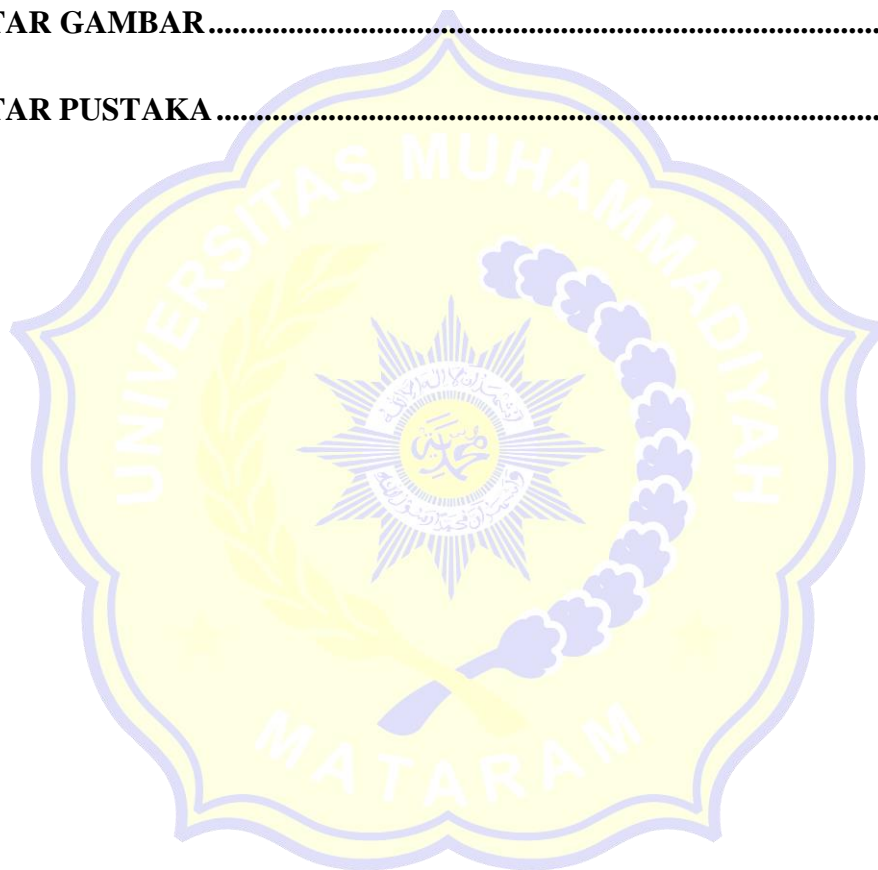
2.1. Penelitian Terdahulu 9

2.2. Landasan Teori..... 28

2.2.1 Demokrasi 28

2.2.2. Konsep Demokrasi	30
2.2.3. Sejarah Demokrasi	31
2.2.4. Ciri-Ciri Sistem Demokrasi	36
2.2.5 Pendidikan Pemilih	38
2.2.6 Tujuan Pendidikan Pemilih	44
2.2.7 Manfaat Pendidikan Pemilih	46
2.2.8. Aktivitas Pendidikan Pemilih	47
2.3. Kerangka Berfikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1. Jenis Penelitian	53
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
3.3 Pemilihan Informasi dan Narasumber	54
3.4. Jenis Dan Sumber Data	55
3.5. Teknik Pengumpulan Data	56
3.6. Teknik Analisa Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1. Gambaran Umum	63
4.1.1 Profil Lokasi Penelitian	63
4.2. Pendidikan Pemilih Oleh KPU Kota Mataram	75
4.3. Hasil Pemilu Kota Mataram Tahun 2015 dan Tahun 2020	82

4.4. Faktor Penghambat KPU Kota Mataram dalam Melaksanakan Pendidikan	
Pemilih	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran	89
DAFTAR GAMBAR.....	87
DAFTAR PUSTAKA	ii



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi sebagai suatu sistem telah populer di berbagai Negara berkembang, hal tersebut dapat dilihat pada tingkat wacana maupun gerakan sosial politik. Sebagai sistem politik, Demokrasi dianggap dapat untuk mengatur dan menuntaskan hubungan Sosial dan Politik, baik yang melibatkan kepentingan antar Individu, dengan demikian demokrasi dapat menimbulkan keberterimaan oleh Masyarakat sebagai suatu sistem yang dipakai oleh Pemerintah dalam menjalankan roda Kepemimpinan. (Nugroho; 2012).

Ciri umum dari suatu Negara yang menganut paham demokrasi adalah keberadaan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), suatu metode politik yang memberikan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakatnya agar terlibat dalam proses pengambilan kebijakan melalui suatu kompetisi yang adil, jujur dan tanpa kekerasan. Sewalaupun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan suatu bagian yang penting, karena Pemilu memiliki peran sebagai suatu mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Solihah; 2018).

Dalam catatan sejarah Pemilu di peruntukan untuk memilih dewan perwakilan, seperti DPR, DPD, dan DPRD. Namun dengan di amandemennya yang ke IV Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2002, pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang pada awalnya menggunakan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) disepakati untuk dilaksanakan secara langsung

oleh rakyat. Pemilihan presiden yang diselenggarakan pada tahun 2004 merupakan Pemilihan Umum Presiden pertama yang dilakukan secara langsung, dan yang kedua pada tahun 2009. Lalu Pemilihan Presiden ketiga dilakukan secara langsung pada tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan setiap lima (5) tahun sekali (Anugerah;2018).

KPU yang dibentuk sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu. Yang memiliki Kewajiban dan Wewenang hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden No.16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum, Komisi Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten atau Kota dan menyimpannya kepada KPU, Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU, Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten atau Kota.

Setelah mengalami berbagai dinamika dan perjalanan sejarah yang begitu panjang proses demokrasi di Indonesia menemui masa dimana harus tetap melaksanakan pemilu sebagai wujud berjalanya demokrasi di tengah pandemic Covid –19, yang menjadi ancaman nyata bagi dunia. Dengan perintah yang diberikan Oleh pemerintah agar tetap waspada dan mematuhi protocol Kesehatan.

Achmat Yurianto merupakan juru bicara penyelenggara pemilu yang bukan hanya memberikan pendidikan pemilih yang bersifat umum, tetapi juga bersifat khusus karena pendidikan pemilih juga harus relevan dengan kondisi Negara yang sedang berjuang untuk lepas dari ancaman pandemic Covid-19. Tentu hal demikian perlu suatu regulasi atau peraturan, yang bersifat mengikat baik oleh penyelenggara pemilu (KPU), Pengawas pemilu (Bawaslu), Partai politik dan Masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam pemilu tetapi tetap mematuhi protocol kesehatan. Maka dari itu hadirilah peraturan KPU No. 13 Tahun 2020 yang menggantikan peraturan KPU No. 6 tahun 2020.

Sebagai regulasi yang harus di patuhi oleh segala pihak guna menjaga proses berjalanya Pemilu yang aman, Kondusif dan terbebas dari penyebaran pandemic covid-19. Sebab Pemilu yang bersih beserta sadar akan kondisi bangsa dapat melahirkan pemimpin yang bersih. Pemimpin yang bersih, akan menjalankan pemerintahan dengan bersih dan penuh kesadaran dalam melihat situasi bangsa. Pilihan dalam mewujudkan kepentingan yang menguntungkan rakyat adalah dengan memilih pemimpin secara demokratis dan bersih.

Kota Mataram ialah kabupaten kota yang saat ini sedang mengadakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Mengapa peneliti menganggap tempat ini sebagai tempat penelitian. Karena Mataram merupakan Kota yang di jadikan sebagai ibu kota Nusa Tenggara Barat yang pada tahun 2017 Luas Wilayah Kota Mataram adalah 61,30 km² . dan penghuninya yang mencapai 419.508 jiwa. Sebagai daerah yang di jadikan sebagai Ibu Kota suatu Provinsi tentu memiliki Mobilitas penduduk yang begitu tinggi dan memiliki

permasalahan yang begitu kompleks, terutama dalam persoalan Partisipasi politik yang rendah pada tahun 2015 contohnya menurut Wakil Ketua DPD RI, partisipasi politik di Kota Mataram berada pada angka di bawah 50%. Tentu fenomena seperti ini harus di jadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu (KPU), Untuk meningkatkan partisipasi politik Masyarakat di pemilihan umum Wali kota Mataram di tahun 2020 (Farouk Muhammad;2015).

Berdasarkan hasil penelitian. Menyatakan bahwa aktivnya penduduk Kota Mataram berada di angka 222.687 pemilih, jika di lihat pada penelitian antar model partisipasi pemilih aktif dan pemilih apatis, masyarakat Kota Mataram termasuk dalam pemilih berpartisipasi aktif dengan jumlah 60% sedangkan pemilih apatis berjumlah 40%. (Ayatullah;2019)

Tentu rendahnya partisipasi politik akan tetap menjadi masalah dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu. Apalagi di tambah dengan kondisi pandemic Covid – 19 yang akan sangat membatasi partisipasi politik bagi Masyarakat Dengan Jumlah pemilih yang ditetapkan KPU Kotaa Mataram pada Pilkada 2020 sebanyak 302.156 yang terdiri dari 146.620 laki-laki dan 155.536 perempuan. Oleh karena itu, dengan penjelasan di atas, penelitian memilih untuk mencari pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram pada tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pendidikan Pemilih Oleh KPU Kota Mataram dalam pelaksanaan pilkada di masaa pandemic Covid-19 tahun 2020” (Studi kasus

penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 Di Kota Mataram).

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan Latar belakang tersebut maka Peneliti dapat Merumuskan Masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram dalam memberikan pendidikan Pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Mataram tahun 2020?
2. Untuk Mengetahui Kendala penghambat Komisi pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan pendidikan pemilih ke Masyarakat maupun kelompok yang berpartisipasi dalam pemilu?

1.3 Tujuan Penulisan

sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui pendidikan pemilih yang dilakukan Oleh KPU Kota Mataram dalam pelaksanaan pemilihan Walikota di Kota Mataram tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kendala dan Faktorpenghambat Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram dalam memberikan pendidikan pemilih ke Masyarakat maupun kelompok yang berpartisipasi dalam pemilu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang di lakukan, dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu adalah manfaat secara teoritis,praktis dan akademik. Adapun uraian dari manfaat penelitian tersebut diatas yaitu.

1.4.1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pikiran dan memberikan suatu wawasan ataupun pengetahuan baru terhadap jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Mengembangkan keilmuan yang di dapatkan selama di bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan bagi pembaca terkait strategi pendidikan pemilih, yang di lakukan Oleh KPU Kota Mataram. Dimasa pandemic covid-19, Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih pada tahun 2020.

1.4.2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti : dapat mengetahui secara lebih merinci mengenai strategi KPU Kota Mataram dalam melaksnakan pendidikan pemilih dimasa pendemi covid-19 tahun 2020
- b. Manfaat bagi pembaca : pembaca dapat mengetahui terkait pendidikan pemilih yang di berikan oleh penyelenggara pemilu (KPU), di masa pandemic covid-19.

1.4.3 Secara Akademik

Hasil dari penelitian ini,diharapkan dapat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai studi (S.1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan dapat memberikan informasi yang berarti bagi perguruan tinggi sebagai agen sosialisasi terhadap kebijakan pemerintahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini di jadikan sebagai suatu refrensi bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, agar penulis mampu memperbanyak Refrensi yang bisa di pakai untuk melaksanakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. sesuai penelitian terdahulu, peneliti tidak melihat judul yang sesuai seperti dengan judul penelitian penulis. tetapi peneliti memakai berbagai objek penelitian dalam refrensi untuk memperbanyak bahan kajian dalam penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis.

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Amir Syamsuadi, Universitas Abdurrah Riau Indonesia, Masa Depan Pemilihan.Kepala Daerah Di.Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.	Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang terlaksana pada Situasi pandemi COVID-19 dapat dijadikan sebagai pengingat bagi para calon Kepala daerah. Untuk menyesuaikan	Perbedaan antara peneliti terdahulu dan judul yang di angkat oleh peneliti adala lebih condong terhadap solusi dan saran yang harus di ambil oleh	Persamaan antara peneliti dan peneliti terdahulu adalah kesamaan dalam meneliti terkait pelaksanaan pilkada

		<p>segala kegiatan yang menunjang pencalonan seorang Kepala daerah Dengan berbagai pengaturan Pilkada 2020. Di hadapan dengan situasi tersebut sudah seharusnya calon kepala daerah mulai memandang cara baru yang dapat menggantikan model kampanye dengan membuat kerumunan secara tatap muka, untuk di gantikan dengan Pemakaian teknologi Aplikasi media massa dalam pelaksanaan kampanye nya. Pandemi COVID-19 mampu untuk ditandai sebagai momentum bangkitnya kampanye yang berisi dengan ide dan gagasan yang di narasikan dan dapat di terima oleh Masyarakat. setiap calon harus memantaskan diri agar</p>	<p>KPU dalam proses penyelenggaraan pilkada di masa pandemic Covid – 19.</p>	<p>di tengah masa Pandemi Covid 19 tahun 2020, yang menjadi sesuatu hal yang baru dalam sejarah penyelenggaraan pilkada di Indonesia.</p>
--	--	--	--	---

		<p>melaksanakan kampanye digital. Pandangan calon yang masih terpaku akan keyakinan bahwa kampanye melalui metode yang sering di pakai yaitu dengan mengumpulkan massa, perlu dirubah. Demikian juga paradigma pragmatis, hal tersebutdi sebabkan proses elektoral yang terjadi di masa reformasi, baik pemilu ataupun pilkada masih kurang mengeksplorasi narasi calon sebagai kekuatan untuk menarik massa. penyebabnya, setiap calon diwajibkan memberikan gagasan atau ide. dalam kompetisi ide-ide hebat yang akan ditawarkan kepada para pemilih. Tidak hanya kampanye dengan bantuan sosial (bansos) yang berbentuk pembagian uang dan</p>		
--	--	---	--	--

		<p>kebutuhan pokok masyarakat, yang sampai saat ini melahirkan permasalahan terkait, apakah dapat tergolong sebagai penyimpangan atau jika bansos di lampirkan gambar yang berisi oleh para calon kepala daerah. Atau dengan pelaksanaan agenda seperti yang dilakukan calon Bupati Minahasa Utara, Shintia Gelly Rumumpe yang memberikan bantuan masker, cairan pembersih tangan, stiker, dan uang Rp 50.000 kepada warga di Desa Tatelu, Dimembe, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Masker dan cairan pembersih tangan merupakan hal yang sangat di butuhkan oleh Masyarakat dimasa pandemi COVID-19 (Kompas, 16-4-2020). Hal yang perlu</p>		
--	--	--	--	--

		<p>ditanyakan, ialah regulasi terkait pengumpulan Rakyat yang akan memilih dengan melakukanpembagikan masker, cairan cuci tangan, stiker, dan uang yang tidak izinkan oleh KPU karena memicu terkumpulnya massa. Selain itu, apakah ada kemungkin KPU hanya dapat melaksanakan dialog politik sebagai, cara terwujudnya kemungkinan calon dalam kegiatan kampanye. masalah tersebut yang tidak dapat di tuntaskan oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2020.</p> <p>Dengan Harapan mampuuntuk di jadikan sebagai dasar bagi penyelenggaraan Pilkada serentakuntuk</p>	
--	--	--	--

		<p>menentukan pilihandalam kondisi urgen, Perppu tersebut di nilai terlalu jauh dalam konteks payung hukumbagi KPU dalam menentukan kebijakan pada kondisi yang rumit ataupun darurat. Dalam hal mekanisme kampanye, KPU berada pada situasi dimanapelaksanaan pilkada di sesuaikan dengan adanya aturan PSBB. Hal ini di sebabkan karena bentuk “tradisi politik” yang sudah ada dan menjadi kebiasaan bagi calon yang berada pada proses elektoral tidaklah perlu adakepentingan untuk menawarkan inovasi. sifat pemilih yang condong transaksional menjadi sebab terjadinya kampanye dalam pemilu dan pilkada mamputerdominasi</p>		
--	--	---	--	--

		<p>akan kampanye model lama, pergerakan pemilih yang memiliki sifat pragmatisme. Kampanye dan politik transaksional di satu sisi dan politik imbalan di sisi yang lain. Kampanye transaksional hadir untuk pertama kalinya pada pemilu 2004, yang berkelanjutan hingga saat ini. dampaknya, calon kepala daerah memiliki rasa keraguan saat berkampanye, seperti bagaimanakah cara memanfaatkan baik melewati media poster atau media lainnya seperti <i>teleconference</i> di zoom dapat menggantikan pola hubungan kampanye “NPWP (<i>nomor piro wani piro</i>)”. Pilkada 2020 di saat pandemi diharapkan mampu merubah cara berkampanye yang tidak</p>		
--	--	---	--	--

		<p>ber simbol dan tradisional. setiap calon dan tim pemenangan kandidat akan dipaksakan untuk kreatif melahirkan inovasi yang tidak sama pada saat pelaksanaan kampanye sebelumnya.</p> <p>Pelaksanaan Pilkada 2020, baik KPU dan Bawaslu di wajibkan membentuk beberapa peta jalan (<i>road map</i>) untuk meng Conter dari tingkat terjadinya malpraktik yang di uraikan di atas.</p> <p>Tujuannya tentu, agar Pilkada 2020 tidak di Justifikasikan sebagai pilkada yang di nilai tidak teratur dan yang tidak berintegritas.</p> <p>Berbagai antisipasi harus dilaksanakan oleh penyelenggara pilkada, yang di laksanakan oleh KPU dan Bawaslu.</p> <p>Pertama, KPU harus mengeluarkan Regulasi</p>		
--	--	--	--	--

		<p>KPU (PKPU) yang mengartikan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, khususnya terkait dengan pandangan pelaksanaan pilkada bisa ditunda atau tidak dilaksanakan. walaupun dapat dinilai sebagai anomali, tetapi ini dapat dijadikan sebagai upaya yang bisa di kerjakan. hubungan antara KPU, Bawaslu, Komisi II, dan Kementerian Dalam Negeri saat merumuskan peta jalan antisipasi untuk mengurangi terjadinya hal yang tidak di inginkan. Seperti dampak situasi pandemi COVID-19.</p> <p>pelaksanaan Pilkada 2020. Kedua, Bawaslu sejak awal mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan malpraktik Pilkada 2020 sesuai dengan Indeks Kerawanan Pilkada</p>	
--	--	---	--

		2020 yang pernah disusun, dengan menjalankan koordinasi bersama KPU, khususnya dalam merumuskan berbagai skema inovatif dalam rangka mengantisipasi <i>bottleneck</i> yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.		
2.	Ika Rahmat Laila, Efendi, Ichwan Agus, Analisis Sosialisasi Politik Masa Pandemi Covid 19 Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2020. (Studi Kasus Di Kpu Kota Sungai Penuh).	Desentralisasi yang ada di Indonesia dalam Konteks perjalanan politik local berada pada era baru. Pemilihan Umum kepala daerah langsung (pilkada langsung) yang di implementasikan sesuai dasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah disertakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Pemilihan, Penyerahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala	Dalam hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan tujuan penelitian yaitu berada dalam hal. Kritikan dari penelitian terdahulu tentang berbagai regulasi aturan yang dibuat oleh KPU dalam penyesuaian covid-19. Dengan memubarkan kondisi pandemic covid-19 yang memiliki resiko ketika tetap menginginkan	Persamaan anantara peneliti terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji terkait pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan kepercayaan partisipan politik dimasa pandemic covid-19.

		<p>Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah menandakan bahwa dimulainya era demokrasi langsung. Kedua landasan peraturan yang dimaksud, merupakan aturan dalam pelaksanaan Pilkada dengan langsung. Kesuksesan demokrasi politik pada negara diawali oleh terselenggaranya pilkada langsung menunjukkan bahwa di Indonesia sudah terjadi sistem politik yang demokratis dan memiliki ke stabilan dalam pemerintahan yang terdesentralisasi, sistem mengawal dan imbang (checks and balances) yang makin baik (Usman, 2003). Saat pelaksanaan pemilu di berbagai negara, partisipasi pemilih sering dijadikan</p>	<p>penyelenggaraan pilkada sedangkan penelitian melalui tujuan penelitian sudah memburkan untuk meneliti pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>sebagai isu bersama, hal tersebut di sebabkan karena berkaitan dengan banyak pemilih yang memiliki hak pilih. Negara ada agar untuk menjamin suara pemilih di lokasi pemungutan suara (TPS). Sosialisasi politik sangatlah penting untuk membentuk kehidupan negara yang demokratis. faktor berhasilnya demokrasi ditandai adanya peningkatan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan politik seperti partisipasi saat pemilihan kepala daerah.guna peningkatan partisipasi masyarakat saat pemilihan kepala daerah dibutuhkan sosialisasi terkait pemilihan. Dengan terwujudnya sosialisasi pemilih diharapkan mampu meningkatkan</p>	
--	--	---	--

		<p>pemahaman dan kesadaran politik masyarakat terkait pentingnya pemilu atau pemilihan kepala daerah. Sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming jika pemilihan kepala daerah terjadi pada 9 Desember 2020. Seperti yang sudah di putuskan, awalnya Pilkada 2020 dapat dilaksanakan pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terdampak pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melaksanakan beberapa proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Dampak pandemi COVID-19 tersebut, KPU akhirnya memutuskan melalui surat keputusan KPU</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Nomor: 179/PL.02 kpt/01/KPU/III/2020</p> <p>yang dimana mengatur pemberhentian proses pelaksanaan Pilkada 2020, salah satunya pengesahan dan Waktu kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), pengecekan syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan penyelenggaraan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa proses pilkada tersebut mampu menimbulkan sesuatu hal yang berdampak pada pelaksanaanya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif contohnya, penundaan ini mampu menjadi</p>		
--	--	--	--	--

		<p> peluang bagi calon independen agar melengkapi persyaratan yang sudah di atur. Partai politik dapat lebih relatif mengalami relaksasi dalam melaksanakan kegiatan rekrutmen calon kepala daerah. Dampak positif tersebut tidaklah terlalu memiliki kenaikan, mengingat batas waktu perubahan jadwal pilkadahanya bergeser tiga bulan, yang semula di laksanakan pada 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini dinilai kurang matang, karena terus meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 dan sampai sekarang tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan selesai. Covid 19 adalah virus yang menjadi penyebab adanya penyakit dalam diri </p>	
--	--	---	--

		<p>manusia dan hewan, untuk manusia contohnya</p> <p>menyebabkan infeksi saluran pernapasan, dimulai flu biasa sampai penyakit yang serius misalnya Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/<i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i> (SARS). Coronavirus bentuk terbaru yang ditemukan dalam diri manusia sejak pertama munculnya di Wuhan Cina, di tahun Desember 2019, lalu dinamakan <i>Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2</i> (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) tentu Pentingnya pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih dalam masa pandemi covid 19 ini</p>		
--	--	--	--	--

		<p>dapat di selenggarakan dengan berbagai metode guna meningkatkan partisipasi politik bagi rakyat dalam memilih pada pemilu serentak tahun 2020. dalam penelitian yang telah dibuat oleh Zeparianto dan Adnan (2019:2-3) yang menyatakan bahwasanya sosialisasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan media dengan menggunakan aplikasi Sipadlih yang mampu dipakai di handphone untuk memberikan informasi terkait Pilkada Kota Sungai Penuh tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan umumnya masyarakat Kota Sungai Penuh dalam pemanfaatan media internet yang diakses dengan handphone untuk mendapatkan informasi. Dengan di bentuknya</p>		
--	--	---	--	--

		<p>aplikasi yang di maksud sasarannya ialah terwujudnya kemudahan akses dan penyebarluasan informasi terkait Pilkada Kota Sungai Penuh ke seluruh lapisan masyarakat. Penelitian yang diselenggarakan oleh Wahyudi dan Adnan (2019) yang meneliti terkait pengaruh sosialisasi politik pada partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kota Sungai Penuh tahun 2016. Hasil penelitian menyebutkan jika sosialisasi komisi pemilihan umum berdampak signifikan terhadap keaktifan pemilih pemula. Dari berbagai penelitian yang telah di lakukan, dapat diartikan bahwa sosialisasi politik memiliki hubungan dengan partisipasi</p>		
--	--	--	--	--

		<p>politik. Fenomena yang bisa di lihat pada sekarang ini merupakan unsur kampanye untuk calon atau peserta pilkada justru tidaklah mudah. Waktu yang ada untuk situasi sekarang ini, tidaklah memungkinkan untuk calon untuk memobilisasi masa. Padahal, kampanye di proses elektoral yang ada di indonesia identik dengan pengumpulan masa. Meskipun pada situasi pandemi COVID-19 dapat menjadi situasi yang rumit bagi pengaturan Pilkada 2020, tetapi pilkada pada saat pandemi ini juga dapat mendorong setiap calon kepala daerah untuk meminimalisir kampanye simbolik dan mobilisasi masa. sesuai dengan latar belakang permasalahan tersebut</p>		
--	--	--	--	--

		<p>penelitian ini di laksanakan untuk ingin mengkaji hubungan sosialisasi politik dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Sungai Penuh Tahun 2020.</p>		
--	--	---	--	--

Adapun dari beberapa penelitian terdahulu mempunyai kemiripan dengan judul ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama meneliti terkait pendidikan pemilih. Sedangkan perbedaanya pada objek penelitian, teori yang digunakan dan juga bentuk evaluasinya. dimana penelitian ini dilakukan di KPU Kota Mataram.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa latin. Dengan kata lain, demonstrasi berarti seseorang, dan krathein berarti pemerintah. Demokrasi secara harfiah adalah pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat. Konsep dasar pemikiran politik, dan

falsafah kedaulatan rakyat yaitu segala bentuk kekuasaan politik dikembalikan kepada rakyat sendiri sebagai objek pemerintahan.

Gagasan dalam berkehidupan negara Maupun masyarakat merupakan rujukan dari demokrasi itu sendiri, beserta Kebebasan bagi Masyarakat agar dapat memilih dan ikut andil dalam Pemerintahan melalui Wakil Rakyat yang terpilih melalui pemilu. Selain itu Negara yang memakai Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki tugas untuk memberikan kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakan *rule of law*, pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga Negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak.

Presiden Amerika Serikat (Abraham Lincoln; 1863) mendefinisikan demokrasi perwujudan Warga Negara, dan pemerintahan untuk Masyarakat. Demokrasi adalah rakyat, rakyat dan pemerintahan untuk rakyat. Secara etimologis, demokrasi terdapat dari 2 bahasa asli Yunani, yang memiliki arti demo yang mendefinisikan rakyat atau penduduk suatu tempat dan Kratos atau kratos yang memiliki arti kekuasaan atau kedaulatan.

Merujuk dari pengertian demokrasi, berikut adalah pendapat dari para ahli terkait demokrasi. Sedangkan Pengertian demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut.

1. Harris S. Mengartikan Demokrasi sebagai kekuasaan suatu bentuk kedaulatan rakyat, karenanya kekuasaan dari suatu pemerintahan itu berada dalam diri warga negara, dan merupakan hak untuk masyarakat atau orang

banyak untuk mengatur serta mempertahankan dan melindungi dirinya dari segala intervensi dan pemerkosaan orang lain ataupun badan yang diberikan kekuasaan untuk memerintah (**Hanindita;1985**)

2. Schumpeter (2003) Demokrasi adalah metode yang dipilih oleh para calon pemimpin. Jika rakyat memiliki hak dalam menentukan calon pemimpin untuk memilih dan pemilu, syarat yang harus dipenuhi untuk Negara yang demokratis adalah pemimpin yang dipilih dapat memilih. Membuat keputusan politik di Negara ini.

2.2.2 Konsep Demokrasi

Suatu Negara dapat dikatakan menjalankan sistem demokratis apabila sistem pemerintahannya dapat mewujudkan suatu prinsip demokrasi. Robert Dahl (Srant, dkk; 2008) menyatakan terdapat beberapa prinsip demokrasi yang ada dalam suatu system pemerintahan Negara demokrasi, yaitu:

1. Adanya suatu pengontrolan beserta pengendalian atas kebijakanyang di keluarkan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh suatu lembaga legislative seperti DPR dan DPRD.
2. Dilaksanakanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi bisa berjalan dengan baik apabila ada partisipasi aktif dari warga Negara dan partisipasi tersebut harus dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga Negara harus diberikan informasi pengetahuan yang akurat dan dapat dilakukan dengan jujur.

3. Di berikanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih merupakan pemberian suatu hak pengawasan rakyat terhadap suatu pemerintahan, serta dapat memutuskan pilihan yang terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh rakyat. Hak dipilih adalah memberikan suatu kesempatan kepada seluruh warga Negara, untuk dapat dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.
4. Adanya suatu kebebasan dalam menyatakan pendapat tanpa adanya ancaman. Demokrasi membutuhkan suatu kebebasan dalam menyampaikan pendapat dengan rasa aman.
5. Adanya kebebasan dalam mengakses suatu informasi. Dengan membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga Negara harus mendapatkan akses informasi yang cukup dan memadai. Setiap kebijakan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari DPR serta menjadi kewajiban pemerintah dalam memberikan informasi yang akurat.
6. Adanya suatu kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini dapat memberikan dorongan bagi setiap Warga Negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan Anggota atau kelompok dalam bentuk serikat.

2.2.3 Sejarah Demokrasi

Pada awal perkembanganya demokrasi sudah merangkum beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan

mengenai demokrasi dari suatu kebudayaan Yunani Kuno dan ide terkait kebebasan dalam beragama yang dihasilkan dari aliran Reformasi dan perang-perang agama yang sudah terjadi.

Sistem demokrasi yang terdapat di negara-kota (*city-state*) Yunani Kuno (abad ke- sampai abad ke-3 S.M.) yaitu demokrasi secara langsung(*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan yang di mana hak dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dalam demokrasi Yunani diselenggarakan secara efektif di karenakan berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk yang sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara-kota). Lagi pula, ketentuan demokrasi hanya berlaku bagi warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri atas budak dan pedagang asing demokrasi tidaklah berlaku.

Dalam negara modern yang menganut paham demokrasi tidak hanya bersifat langsung, tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*). Ide demokrasi Yunani bisa dikatakan hilang dari dunia Barat waktu bangsa Romawi, yang masih kental atas kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki pada Abad Pertengahan (00-1400). Masyarakat Abad Pertengahan bisa dicirikan dengan struktur sosial yang feodal (hubungan antara *vassal* dan *lord*); yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya ditandai dengan perebutan kekuasaan antara bangsawan satu sama lain.

Dapat dilihat dari sudut perkembangan demokrasi pada Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang dianggap penting, yaitu *Magna Charta* (Piagam Besar) (1215). *Magna Charta* ialah semi kontrak antara para bangsawan dan Raja John yang berasal dari Inggris, yang di mana untuk pertama kalinya seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan *privileges* dari bawahannya sebagai suatu imbalan dalam bentuk penyerahan dana untuk keperluan perang dan sebagainya. Walaupun piagam ini lahir di dalam situasi yang feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun hal tersebut dapat dianggap sebagai tonggak awal dalam perkembangan gagasan dari sistem demokrasi itu sendiri.

Sebelum pada Abad Pertengahan berakhir serta *Magna Charta* pada permulaan abad ke-1 di Eropa Barat ber munculan negara-negara nasional (*national state*) dalam bentuk yang modern. Eropa Barat mengalami perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini ialah Renaissance (1350-100) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, dan Reformasi (1500-150) yang mendapatkan banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti di Jerman dan Swiss.

Renaissance merupakan Aliran yang dapat menghidupkan niat terhadap Kesusastraan dan budaya Yunani Kuno yang pada abad pertengahan telah di sisihkan. Aliran ini sanggup membelokkan perhatian yang awalnya memiliki arah pada tulisan keagamaan ke arah keduniawian dan dapat mengakibatkan timbulnya paradigma baru. Reformasi beserta perang agama yang telah terjadi pada akhirnya

menyebabkan manusia mampu melepaskan diri dari kekuasaan Gereja, baik dalam bidang spiritual dalam bentuk dogma, dan di dalam bidang sosial politik. Hasil dari pergumulan ini adalah timbulnya suatu gagasan terkait perlunya suatu kebebasan dalam memilih agama serta ada garis pemisah yang menegaskan antara persoalan agama dan persoalan keduniawian, khususnya pada bidang pemerintahan. Hal tersebut dapat dinamakan Pemisahan antara Gereja dan Negara.

aliran di atas di persiapkan bagi bangsa Eropa Barat, dalam masa 150-1800, mengalami masa *Aufklärung* (Abad Pemikiran) dan Rasionalisme, suatu aliran pikiran yang menginginkan kemerdekaan pikiran dari manusia dari batas yang sudah diatur oleh Gereja, dengan mendasarkan pemikiran atas akal (*ratio*). Kebebasan berpikir membuka jalan baru untuk mengembangkan gagasan dan ide di bidang politik. Hingga timbulah suatu gagasan bahwasaya manusia memiliki hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan diberikannya kecaman-kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas.

Monarki absolut ini lahir pada masa 1500-1700, yakni sesudah berakhirnya Abad Pertengahan. Raja-raja absolute ini menganggap bahwa dirinya memiliki hak atas tahtanya berdasarkan konsep dari Hak Suci Raja (*Divine Right of Kings*). Raja-raja yang terkenal di Spanyol merupakan Isabella dan Ferdinand (1479-1511), di Prancis raja-raja Bourbon dan sebagainya. Kecaman yang dilontarkan atas gagasan absolutism, memiliki dukungan dari Masyarakat yang berada pada golongan menengah (*middle class*) yang memiliki pengaruh berkat kemajuan kedudukan ekonomi dan mutu pendidikannya.

dobrakkan terhadap kekuasaan absolut ini berdasarkan atas suatu konsep rasionalistis yang pada umumnya dikenal sebagai suatu *social contract* (kontrak sosial). Salah satu asas dari suatu gagasan kontrak sosial merupakan dunia dikuasai oleh hukum yang timbul atas alam (*nature*) yang memiliki kandungan prinsip keadilan yang bersifat universal yang berarti berlaku untuk semua waktu serta semua manusia, baik raja, bangsawan, atau rakyat jelata. Hukum ini dinamakan Hukum Alam (*Natural Law, ius naturale*). Unsur universalisme inilah yang diterapkan dalam masalah-masalah politik. Teori kontrak sosial menganggap bahwa suatu hubungan antara raja dan rakyat berdasarkan pada kontrak yang mengikat pada kedua belah pihak. Kontrak sosial dapat menentukan di satu pihak bahwa raja diberikan suatu kekuasaan dari rakyat untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana yang membuat Masyarakat mampu untuk menikmati hak-hak alamnya (*natural rights*) dengan aman. Di sisi lain rakyat akan menaati perintah raja asalkan hak-hak tersebut terjamin.

Pada hakikatnya teori kontrak sosial merupakan suatu cara untuk mendobrak dasar pemerintahan absolut dan menempatkan hak-hak politik rakyat. Filosof yang mencetuskan gagasan ini antara lain yaitu, John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755). Jika Menurut John Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). maka Montesquieu mencoba mengatur suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik tersebut, yang dikenal dengan istilah *Trias Politica*. gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik

menimbulkan terjadinya revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris.

akibat dari pergolakan yang terjadi, maka pada Masa akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapatkan wujud yang konkret sebagai salah satu program dan sistem politik. Demokrasi dalam tahap tersebut semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas kemerdekaan yang dimiliki oleh individu, John Locke kesamaan hak (*equal rights*), serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*)

2.2.4 Ciri-Ciri Sistem Demokrasi

Ciri-ciri dari suatu penerapan demokrasi dibuat agar dapat melihat perbedaan pelaksanaan pemerintahan Negara yang demokratis atau yang tidak demokratis. Berdasarkan dari political (Brownh;1989) menegaskan ciri-ciri demokrasi ialah:

1. terjadinya suatu penggantian pemerintahan secara periodik.
2. Rakyat mendapatkan hak yang sama dalam beradanya suatu kedudukan di dalam bentuk pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti, presiden, menteri dan gubernur.
3. terjadinya suatu pengakuan dari anggota masyarakat terhadap para tokoh yang sah dalam berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan sekaligus sebagai tantangan bagi pemerintah yang berkuasa.

4. Dilakukanya pemilihan lain untuk memilih pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan mampu mewakili kepentingan rakyat pemilihnya.
5. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pementtah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat (lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik dan media cetak).
6. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum.

Demokrasi yang dianut di Indonesia sesuai dengan teori demokrasi yang di gagas oleh Scumpeter yang merupakan suatu mekanisme memilih pemimpin politik, yang warga Negara diberikan suatu kesempatan agar bisa memilih salah satu diantara calon pemimpin politik yang sedang bersaing untuk memimpin suatu pemerintahan, system demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang berdasarkan dengan pancasila, masih dalam pengembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas didalam Undang-Undang Dasar 1945. yang belum di amandemenkan. Selain itu Undang-Undang Dasar kita menyebutkan secara eksplisit dua prinsip yang terdapat di dalam naskah tersebut, dan yang tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terkait sistem pemerintahan Negara yaitu:

1. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).

2. Sistem Konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutism* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua(2) istilah *rechtstaat* dan sistem konstitusi diatas maka demokrasi yang di jadikan dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen merupakan demokrasi konstitusional. Disamping itu cirri khas dari system demokrasi Indonesia, adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.

2.2.5 Pilkada

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dijadikanya sistem pilkada secara langsung, mendatangkan rasa optimisme dan pesimisme. karena Pilkada secara langsung di anggap sebagai suatu pengembalian hak-hak dasar masyarakat di Masing-masing daerah, yaitu dengan memberikan kewenangan secara utuh dalam rangka pemilihan pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat daerah. Keberhasilandari pilkada langsung agar dapat melahirkan kepemimpinan daerah

yang demokratis, sesuai dengan keinginan beserta tuntutan rakyat sangatlah bergantung dengan kritisisme dan rasioanalitas rakyat itu sendiri (Joko J. Prihatmoko;2005).

Selain itu arti Pilkada Menurut Pakar adalah sebagai berikut.

A. Suryo Untoro

Pilkada adalah pelaksanaan Pemilu yang di jadikan kesempatan bagi Rakyat sesuai ketentuan dalam memilih, untuk memilihwakilnya seperti di lembaga MPR, DPR, dan DPRD.

B. H.G. Waren

Pilkada adalah momen yang dimanarakyatdi berikan Hak sesuai ke inginan rakyat dalam menentukan pilihan untuk para wakilnya di sistem Pemerintahan, karena hal tersebut sanagt berpengaruh terhadapkepastian tindakan dari Para wakil nya untuk Rakyat itu sendiri.

C. Ramlan

Pilkada merupakansuatu cara menentukan pilihan, dan pemberian. Atau menyerahkan kekuasaan terhadap calon Pemimpin ataupun partai yang di rasa dapat untuk di percaya

D. Ali Mortopo

Pilkada merupakan instansi Demokrasi yang dipakai dalam memilih wakil rakyat.denganmemilih anggota MPR, DPR, dan DPRD yang memiliki tugas ber Koordinasi terhadap pemerintah dan menerapkan politik pada jalannya pemerintahan Negara

Dalam hal Pemilihan, demokratisnya pelaksanaan Pemilu dapat di nilai Demokrasi jika terdapat beberapa Paramter, berikut adalah penjelasan dari parameter tersebut. terbuka, dan Akuntabilitas publik, berikut adalah penjelasan dari masing – masing Parameter yang di maksud.

A. Pemlihan Umum.

Rekrutmen jabatan politik dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan dengan aturan danjadwal yang telah di tetapkan, kompetif, jujur, dan adil. Pemilu adalah suatu proses utama dalam pelaksanaan pemilu. Di karenakanakan dilaksnakanya pemilu bisa terbentuk. lalu sesudah di laksanakanya suatu pemilihan Masyarakat dapat mengawasi serta mengcontrol seberapa besar pemimpin yang dipilih mampu untuk menepati visi misinya. Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu bisa digunakan untuk menjadi dasar dalam menghukum (reward and punishment) pada pemilu yangakan di laksanakan pada periode berikutnya. Pejabat public yang terpilih yang tidak bisa untuk meng Implementasikan janji yang di sampaikan saat belum terpilih dan tidak mampu menjaga amanah yang di berikan oleh rakyat, bisa dihukum dengan tidak di pilih kdi pemilu berikutnya, sebaliknya pejabat Politik berhasil terpilih mampu untuk memenuhi janji kampanye nya maka dapat dipilih kembali di periode berikutnya.

B. pergantian Kekuasaan

pergantian dalam kekuasaan adalah salah satu parameter demokratisnya dalam proses pelaksanaan pemilihan pejabat politik. pergantian kekuasaan dapat menandakan jika suatu pemerintahan maupun jabatan publik tidaklah tepat untuk dipegang oleh seorang maupun kelompok secara berkelanjutan, seperti sistem yang berada pada sistem monarki. Yang berarti, jika seseorang memiliki kekuasaan secara berkelanjutan maupun satu partai politik dapat mendominasi jalannya suatu pemerintahan dengan lebih dominan dari periode ke periode, sistem tersebut tidak dapat dikatakan sistem demokratis. Dengan demikian maka, demokrasi dapat menghasilkan suatu pergantian dalam sistem pemerintahan atau rotasi pejabat publik dengan mengikuti aturan yang sudah berlaku.

C. Rekrutmen Terbuka.

Demokrasi memberikan ruang agar terjadinya suatu rivalitas, di karenakan setiap rakyat maupun kumpulan rakyat mendapatkan kedudukan yang sama. Oleh sebab itu untuk mendapatkan kekuasaan, seperti Kepala Daerah, semestinya dapat membuka ruang terbuka untuk setiap warga yang dapat melengkapi persyaratan yang sudah berlaku, dalam kompetisi yang wajar dengan aturan sudah disepakati. Di negara totaliter ataupun otoriter, rekrutmen pejabat publik hanyalah kekuasaan dominan dari rakyat hingga sekumpulan rakyat.

D. Akuntabilitas Publik.

pemegang jabatan public di haruskan mampu untukmempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebaga pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seorang Kepala Daerah atau pejabat politik lainnya harus bisa menjelaskan kepada public mengapa memilih kebijakan A, bukan kebijakan B. Apapun yang di lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada oleh publik.Demikian pula yang dilakukan kepada keluarga terdekatnya, sanak saudaranya bahkan teman dekatnya seringkali dikaitkan dengan kedudukan atau posisi pejabat tersebut. Hal itu karena pejabat publik merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, memelihara dan bertanggungjawab dengan amanah tersebut.

Selain Parameter, Pilkada juga Memiliki Asas dalam pelaksanaan Pilkada yakni azas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil (Luber dan Jurdil) berikut adalah penjelasan dari Asas Pilkada yang di maksud.

A. Langsung

Rakyat memiliki hak dalam memberikan suaranya, secara langsung sesuai dengan keinginan hati nuraninya, tanpa perantara oleh pihak lain.

B. Umum

sebenarnya seluruh warga Negara yang sudahmemenuhi persyaratan, sesuai dengan peraturan perundangan berhak untuk

berpartisipasi dalam pilkada. Pemilihan yang memiliki sifat umum memiliki pengertian yaitu memastikan kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

C. Bebas

Setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya

D. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

E. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pegawai pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Adil

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan oleh pihak manapun.

2.2.6 Pendidikan Pemilih

Dalam istilah pendidikan pemilih memiliki dua istilah pokok, yaitu pendidikan dan pemilih, maka dari itu sebelum mengartikan terkait pengertian pendidikan pemilih, perlu diartikan terdahulu pengertian dari pendidikan beserta arti pemilih. pengertian, pendidikan dapat di artikan dalam bahasa latin, *educare*, yang memiliki pengertian membina, pendidikan merupakan suatu proses yang dapat membantu penumbuhan, pengembangan, pendewasaan, menata, dan pengarahan. Khan mendefinisikan bahwa pendidikan adalah bentuk suatu pembinaandari kemampuan yang berada di setiap Individu untuk bisa mengembangkan semaksimal mungkin dan memiliki manfaat untuk peserta didik beserta lingkungan di sekitarnya.

Pendidikan yang ada di Indonesia dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan pengembangan Potensi, berlandaskan dengan falsafah hidup Pancasila. dengan misi tersebut, UU Nomor 20 tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional merumuskan pendidikan sebagai upaya sadar dan terprogram agar terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif dalam pengembangan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ki Hadjar Dewantara saat kongres Taman Siswa I tahun 1930, mengartikan pendidikan

sebagai usaha dalam memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak (Mahfud 2009). *Dictionary of Education* mengartikan pendidikan merupakan wujud dari individu yang mampu mengembangkan Sumber daya Manusia, perilaku, dan bentuk perilaku yang lainnya pada lingkungan sekitarnya. agar dapat hidup, dan bersosial di mana orang di pertemukan oleh kondisi sekitar yang terpilih dan terkontrol, dan ia mendapatkan dan menjalani pengembangan dalam bersosial dan potensi diri yang maksimal.

Menurut berbagai definisi yang telah di uraikan sebelumnya, maka bisa diartikan bahwa pendidikan merupakan upaya yang dilaksanakan dengan sengaja agar dapat menyelami dan mengembangkan Kemampuan yang berada pada diri manusia untuk, memiliki potensi dalam menanggapi lingkungan dengan positif atau melakukan perubahan (pengetahuan, sikap, dan perilaku) yang bermakna bagi diri manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Pendidikan adalah wilayah dari tanggung jawab pemerintah yang besar, sehingga pendidikan publik memiliki politis di karenakan diatur oleh pemerintah dan mempengaruhi kesuksesan kinerja pemerintah. dengan kuatnya hubungan antara pendidikan dengan politik (kebijakan pemerintah), maka kebijakan pemerintah dalam posisi pendidikan merupakan refleksi dari pandangan terkait masyarakat maupun keyakinan politik. Selain pendidikan, dalam pendidikan memilih terdapat konsep pokok lainnya yaitu memilih.

Pengertian Memilih merupakan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, memilih diartikan sebagai Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Sedangkan Pengertian menurut Para ahli adalah Menurut (Firman zah:2007) pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Namun, menurut Joko J. Prihatmoko (2005). pemilih yang merupakan bagian dari masyarakat luas bisa tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Sedangkan Pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu adalah pendidikan untuk menanamkan nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu pemilih adalah setiap warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih ketika pemilu/ pemilihan dilaksanakan. Indonesia selama ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah serta warganegara Indonesia sebagai syarat untuk disebut sebagai pemilih. Warganegara yang dalam rentang waktu lima tahun kemudian menjadi pemilih disebut sebagai pra-pemilih.

Pendidikan Pemilih, dengan demikian, adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu tertentu. Dalam pendidikan pemilih, di dalamnya mencakup pemberian informasi kepemiluan, pemahaman mengenai 3 aspek-aspek pemilu serta demokrasi. Pendidikan pemilih penting karena beberapa alasan yaitu Membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik. Semakin banyak pemilih yang paham dengan

proses pemilu dan demokrasi dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana pemilih seharusnya bertindak. Beserta Meningkatkan partisipasi pemilih dan Kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan luas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat. dan Meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Angka kecurangan pemilu, konflik pemilu, mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih sehingga menghasilkan pemenang pemilu yang berkualitas. Pendidikan pemilih membentuk nilai dan kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemilih dalam sistem demokrasi. Ini akan memperkuat advokasi warganegara terhadap sistem demokrasi dibandingkan sistem politik lain.

Masyarakat umumnya terdapat dari berbagai kelompok. Setiap warga negara harus memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi tersebut yaitu sebagai berikut.

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
3. Terdaftar sebagai pemilih.
4. Bukan anggota TNI/Polri aktif
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. Terdaftar di DPT.
7. Khusus untuk Pemilu kada calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Selain Syarat-syarat untuk menjadi pemilih, terdapat pula tipe-tipe Pemilih Sebagai Berikut.

1. **Pemilih Rasional** Pemilih memiliki orientasi tinggi pada policy problem solving dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau kontestan dalam program kerjanya. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Faktor seperti paham, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai partai atau kontestan. Pemilih jenis ini mulai banyak terdapat di Indonesia, terutama sejak lengsernya Soeharto dari pemerintahannya akibat reformasi.
2. **Pemilih Kritis** Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai politik atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah “rational voter” untuk berpaling ke partai lain.
3. **Pemilih Tradisional** Pemilih dalam jenis ini memiliki ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang

kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai asal usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figure dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye. Loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini.

4. Pemilih Skeptis. Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik jenis ini sangat kurang karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang memedulikan program kerja atau 'platform' dan kebijakan sebuah partai politik.

2.2.6 Tujuan Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, Adapun Tujuan dari Pendidikan Pemilih adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pendidikan pemilih di tujuan untuk Peningkatan partisipasi pemilih. Partisipasi merupakan keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode pemerintahan, yaitu dalam periode pemilihan dan periode di

pasca pemilihan. dalam periode pemilihan, pendidikan pemilih diartikan sebagai pendorong agar pemilih dapat terlibat pada setiap tahapan pemilihan. dalam Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi yang dapat dilihat mapan, partisipasi untuk memberikan suara berada dalam angka 70%. Partisipasi ini harus dicatat sebagai bukan mobilisasi. Angka partisipasi tersebut di nilai penting karena berkaitan dengan biaya pemilu yang mahal, legitimasi dan efektifitas kepemimpinan pejabat yang dipilih, serta eksistensi sistem demokrasi. Pada periode di luar pemilu, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi pemerintahan. Partisipasi pemilih umumnya rendah. Pemilih cenderung mengabaikan dan menyerahkan proses politik kepada kelompok elit. situasi tersebut tidak baik karena pada fase ini nasib pemilih sesungguhnya ditentukan oleh pemerintah melalui kebijakannya.

2. Meningkatkan kemampuan Literasi politik pemilih adalah tujuan dari peningkatan dalam literasi politik yang berada pada Materi pendidikan Pemilih. Literasi politik merujuk dalam suatu kemampuan yang diperlukan pemilih agar berpartisipasi dalam sistem pemerintahan. Kemampuan dalam literasi pemilih meliputi pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang menunjang pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Kemampuan literasi politik diperlukan sebagai suatu syarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode pemilihan dan di luar

periode pemilihan. Literasi politik yang dapat di nilai progresif menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bertindak dan berpartisipasi pada sebuah proses politik. Pengenyampingan kepentingan pemilih dapat dihindari dengan kemampuan literasi politik yang baik. Pemilih, dengan berbagai latar belakang, akan memiliki pemahaman dalam berbagai proses politik yang sangat mempengaruhi kehidupannya. Taraf literasi politik yang cenderung rendah menjadikan proses politik akan didominasi oleh segelintir elit. Kepentingan pemilih akan tersingkirkan dan rentan dimanipulasi. Dengan literasi politik yang bagus akan menimbulkan korelasi antara pemilih dengan proses politik (state and civil engagement)

3. Peningkatan Kerelawanan (Voluntaritas) Pendidikan pemilih juga dapat bertujuan untuk meningkatkan Pedoman Pendidikan Pemilih sikap kerelawanan pemilih. Kerelawanan adalah partisipasi pemilih dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealisme tertentu dengan tanpa pamrih. Ide pokoknya adalah pada kehendak individu sebagai hasil dari kesadaran untuk berpartisipasi. Lawan dari kerelawanan adalah pragmatisme pemilih. Pragmatisme merujuk pada perilaku untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam proses politik karena adanya insentif material. Pada sikap pragmatis, pemilih melakukan komodifikasi atas partisipasi mereka dalam proses politik. Pemilih memperdagangkan posisi mereka untuk ditukar atau diperjual-belikan dengan sesuatu yang bersifat

material. Situasi ini menjadi persoalan serius yang menggerogoti fundamental demokrasi. Sebab, demokrasi akan menjadi mahal, hubungan pemilih dengan pejabat publik akan terputus seketika transaksi sudah berlangsung, dan korupsi akan berkembang biak. Pendidikan pemilih harus mendorong berkembangnya kerelawanan, dan sekaligus mengikis pragmatisme. Kerelawanan yang tumbuh baik dalam proses politik akan memperkuat bangunan demokrasi..

2.2.7. Manfaat Pendidikan Pemilih

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu merangkak naik, baik itu pemilihan umum, pemilihan kepala daerah hingga yang terkecil pemilihan ketua RT.
2. Meminimalisir Politik Uang. Politik uang selama ini di jadikan untuk mengambil suara masyarakat yang belum memiliki kesadaran berdemokrasi. Karena pola pikir yang menganggap akan memilih tergantung berapa rupiah yang didapatkan.
3. Manfaat pendidikan pemilu dapat mengajak generasi muda sejak dini, sehingga sejak usia dini sudah sadar dan paham apa itu demokrasi sehingga generasi muda tidak mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpolitik kotor.
4. Partai politik dapat menyegarkan struktural nya oleh generasi muda yang sudah paham politik diluar pendidikan formal, sehingga partai politik bisa menghapuskan kader-kader yang telah menjadi narapidana dan mantan narapidana.

2.2.8 Aktifitas Pendidikan Pemilih Oleh KPU

Dalam proses Aktifitas pendidikan pemilih, KPU Memiliki 5 Strategi untuk Mencapai suatu tujuan yang di Harapkan yaitu:

2. Penggunaan Teknologi Informasi

Dengan berkembangnya teknologi informasi, Hampir Seluruh Masyarakat dapat bersentuhan langsung dengan teknologi informasi. Di tambah pula dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk itu maka harus ada respon yang baik untuk melihat teknologi informasi sebagai metode yang efektif dalam pelaksanaan pendidikan pemilih. Karena Teknologi informasi dapat memiliki daya jangkauan yang sangat luas dengan akses real time. Internet, gadget, sistem aplikasi, teknologi visual, audiovisual dan sebagainya, saat ini sangat dekat kaitanya dengan berbagai elemen masyarakat. Dengan itu berbagai informasi berupa data, suara, gambar dan video mampu untuk diperoleh dengan cepat, mudah dan murah. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak tersentuh akan kehadiran teknologi informasi. Pendidikan pemilih dengan memanfaatkan teknologi informasi kontemporer dapat mendorong partisipasi pemilik hak pilih. Pemilih akan terdorong serta berkontribusi dan memberikan umpan balik terkait topik atau masalah yang sedang menjadi pembahasan bersama,

atas kesadaran sendiri. Pendidikan pemilih dapat dijadikan untuk lebih transparan dan memiliki jangkauan oleh semua pihak dan sepanjang waktu. Hubungan dan jejaring antar sesama pengguna yang ikut serta dalam pendidikan pemilih dapat tercipta dengan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Pemanfaatan Media Massa

Media Massa memiliki sifat Konvensional tetapi media massa dapat di jadikan sebagai suatu cara yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada pemilih. Di karenakan media masa mampu untuk menjangkau seluruh elemen Masyarakat tanpa terkecuali. Media massa mampu memberikan kontribusi dalam proses pelaksanaan pemilih dalam rangka memaksimalkan pendidikan pemilih untuk menggunakan hak suaranya sesuai dengan nilai nilai demokrasi. pada umumnya, media massa dapat dibagi ke dua kelompok, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik merupakan televisi, film, video, dan radio. Media massa yang memiliki fungsi persuasif dapat menentukan kesadaran pemilih. Media masa dapat mempengaruhi pemilih atas berbagai problem sedang yang berkembang. Media massa mampu mengatur suatu budaya politik dan partisipasi politik pemilih. Begitu

efektifnya posisi media massa, ia sering diartikan sebagai pilar keempat dalam demokrasi.

3. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan dapat di jadikan sebagai sutuelemen strategis dalam pelaksanaan pendidikan pemilih.Di karenakan, lembaga pendidikan berada di berbagai daerah secara pararel dengan keberadaan KPU.Kedua, peserta pendidikan pemilih yang berada lembaga pendidikan cenderung solid.Ketiga, dalam lembaga pendidikan memiliki jumlah pemilih yang besar terutama para pemilih pemulahal tersebut menjadikan awal yang baik dalam pelaksanaan pendidikan pemilih dalam upaya membentuk sikap dan perilaku.Ia mampumenjadi dasar dan penyaring dari bermasam-macam hal yang sampai kepada pemilih. Nilai yang ditanamkan dapat menjadikankarakter pemilih ke depan. Dalam lembaga pendidikan, pendidikan pemilih bisa untuk dimasukkan dalam mata pelajaran yang relevan atau dalam kegiatan di lembaga pendidikan seperti upacara bendera dan pemilihan ketua kelas, OSIS, atau lembaga perwakilan mahasiswa.

4. Pemanfaatan Aktifitas Sosial Budaya

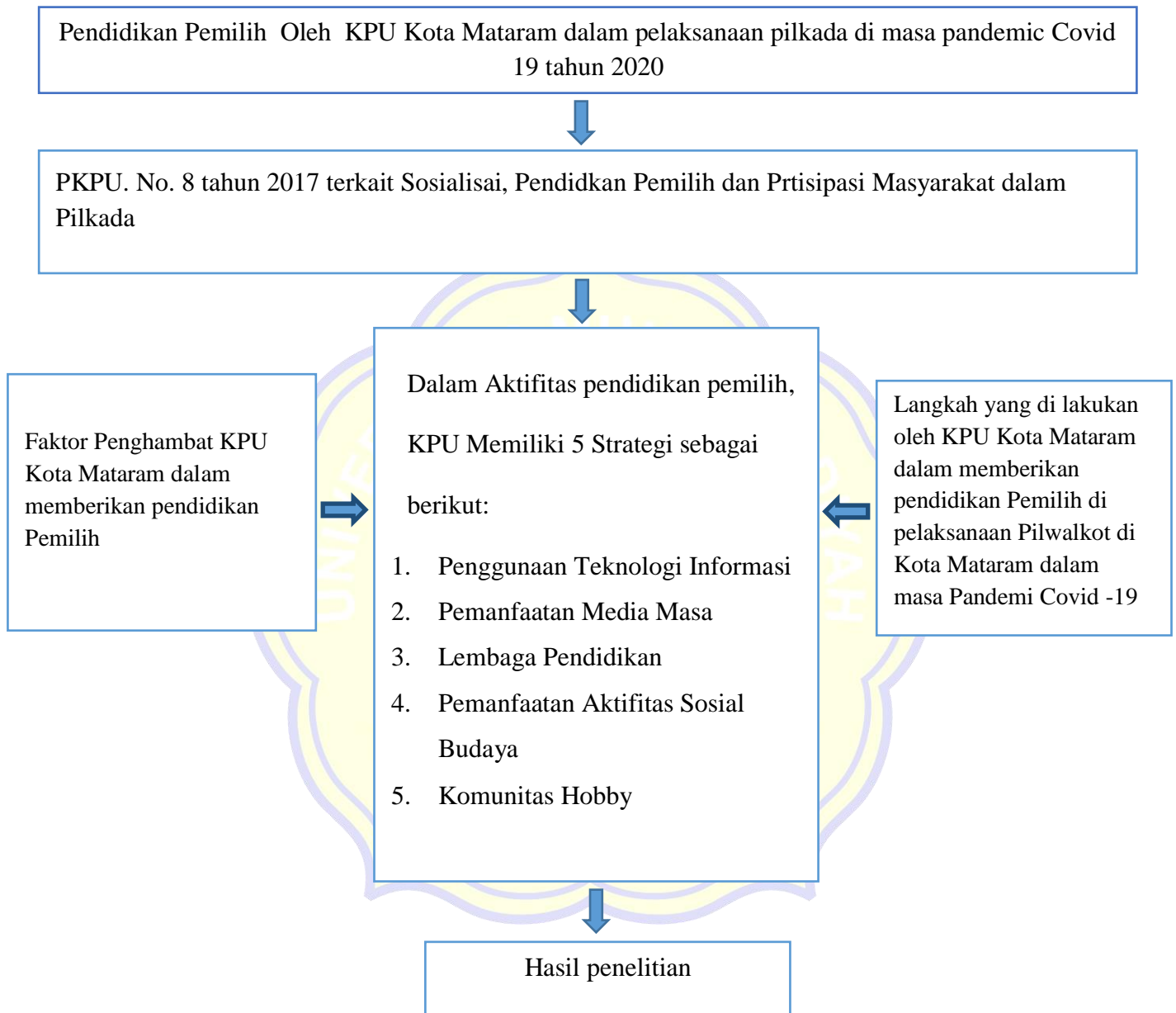
Masyarakat Indonesia dengan pola interaksinya yang berjenis paguyuban atau kelompok. Dengan tipe Masyarakat yang masih kental akan berbagai aktivitas Sosial budaya. kegiatan sosial budaya itu dijalankan secara misal sesuai dengan kultur masing masing daerah. Kegiatan itu ada yang terpilah dalam bentuk segmentasi tertentu sehingga sampai pada dengan terlibatnya berbagai kalangan. Wujud kegiatan sosial budaya di antaranya adalah pawai, perlombaan, rembug desa, kegiatan arisan, PKK, pertunjukan seni, kepemudaan, keagamaan, dan sebagainya. Aktifitas sosial budaya mampu untuk di jadikan sebagai salah satu metode penting dalam pelaksanaan pendidikan pemilu. Di karenakan Kegiatan sosial budaya selalu diikuti oleh banyak orang dan mendapatkan perhatian dari publik. Melalui strategi ini, pendidikan pemilu dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat.

5. Komunitas Hobby

Program pendidikan pemilu dengan masuk dalam ranah komunitas atau Hobby, walaupun hal tersebut tidak berkaitan dengan dunia per politikan. Tetapi kemungkinan dalam melaksanakan pendidikan pemilu dalam ranah tersebut masih memiliki kemungkinan untuk dapat memaksimalkan agenda pendidikan pemilu itu sendiri, Pendekatan yang di pakai memang

tidak dapat dilakukan seperti pendekatan yang dipakai oleh program pendidikan pemilih yang lain. Salah satu ciri dari komunitas hobby adalah kegiatannya a-politis, bahkan juga tidak jarang mereka tidak ingin ikut kepada kegiatan-kegiatan politik. Oleh karena itu pendekatan terhadap mereka tidak bisa dengan mudah membawa simbol-simbol institusi politik (Partai politik, DPR, Presiden) ke hadapan mereka. Karena justru bisa menimbulkan antipati dari mereka. Namun dengan pendekatan yang tepat, komunitas hobby bisa menjadi wahana yang tepat bagi proses pendidikan politik di negeri ini. Karena komunitas hobby ini memiliki karakteristik ikatan kelompok yang kuat antar anggotanya. Sehingga apabila satu dua orang sudah mengerti tentang tujuan pendidikan pemilih, maka ia akan mempengaruhi anggota lainnya. Pendidikan pemilih melalui komunitas hobby adalah kegiatan a-politis yang berdampak politis.

2.3. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan saat proses penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Hal tersebut dipilih untuk menyuguhkan data dengan sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang berada di lapangan. Di dalamnya metode penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat memahami pendidikan memilih oleh KPU Kota Mataram dalam pilkada di masa pandemic Covid-19.

David Williams di bukunya (Moleong;2012) menyebutkan penelitian kualitatif adalah dengan cara pengumpulan data dalam suatu latar alamiah, memakai metod alamiah, serta dilakukan oleh peneliti yang meneliti secara alamiah. maka arti tersebut memberikan penjelasan bahwa penelitian kualitatif memilih mengutamakan latar alamiah, metod alamiah, serta dipakai oleh individu yang memiliki pandangan alamiah (Moleong;2012).

Maka bisa disimpulkan bahwasanya metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, merupakan metod yang memiliki tujuan untuk menjabarkan secara sistematis terkait kondisi dan korelasi dengan variabel yang diteliti dengan pengumpulan data, mengatur, menelaah serta menginterpretasi data dengan bentuk kalimat.

3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian menurut Iskandar dalam As Syafiq (2019) adalah situasi lingkungan sekitar yang berkorelasi pada tema penelitian. Selanjutnya Moleong dalam As Syafiq (2019) menyebutkan jika menentukan tempat penelitian maka metode yang dipakai adalah dengan mempertimbangkan kondisi substantif berada pada lapangan untuk menemukan keselarasan dengan kondisi yang berada di lapangan, tetapi terbatas geografis dan praktis seperti waktu, biaya serta tenaga perlu sekiranya di pertimbangkan dalam menentukan tempat penelitian. Agar bisa menghasilkan data, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram.

3.3. Pemilihan Informan dan Narasumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *snowball sampling* atau teknik bola salju. Menurut Sutopo dalam As Syafiq (2019: 35) menyebutkan bahwa penelitian yang menggunakan metode *snowball sampling* merupakan penelitian tanpa rencana, mengorek informasi kepada informan satu yang kemudian menunjukkan informan kedua dan kemudian demikian juga dengan informan kedua menunjukkan informan ketiga hingga seterusnya sampai dirasa informasi yang diperoleh lengkap dan mendalam. *Snowball sampling* dilakukan untuk melengkapi informasi yang ada sehingga pada saat proses pengumpulan data, peneliti tidak membuat batasan jumlah informan dan lebih memilih informan yang mengetahui masalah secara mendetail.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Mataram. Anggota Komisioner, divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sdmserta informan lain yang dianggap mempunyai hasil mendetail.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam pelaksanaan penelitian membutuhkan data yang akurat agar hasil kajian mampu di pertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam melaksanakan penelitian ada 2 (dua) jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data kualitatif merupakan jenis data yang merupakan data yang melihat fakta dengan gejala yang berada di lapangan
- b. aripsikan suatu sistematis analisis dan logis.
- c. Data kuantitatif adalah suatu data yang menggambarkan permasalahan dan gejala dari sifat kuantitas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. dalam penelitian tersebut akan memperjelaskan dan mendiskripsikan informasi yang terkumpul dari informan yaitu data yang berbentuk kalimat, tindakan dan gambar pada objek.

2. Sumber Data

Dilihat dari tujuan penelitian , sumber data digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu data primer dan sekunder. Berikut adalah penjelasan dari 2 bagian tersebut:

- a) Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono;2015). Observasi dan wawancara langsung dengan informan adalah data primer yang di pakai dalam penelitian ini.
- b) Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono;2015). dengan melakukan pencatatan, pengumpulan-pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan di teliti merupakan adalah data yang di pakai dalam penelitian ini. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pelengkap (Sugiyono;2008).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mendapatkan data yang relevan dan lengkap, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun Teknik – teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Jenis observasi yang tidak melibatkan secara langsung peneliti adalah pengertian dari teknik pengumpulan data dengan observasi non partisipan, Adapun hal-hal yang akan diamati adalah Pendidikan oleh KPU Kota Mataram dalam pelaksanaan Pilkaada dimasa Pandemi Covid-19.

2. Wawancara

Metode yang di pakai dalam wawancara ini merupakan wawancara terstruktur dengan memakai pedoman wawancara yang telah ditentukan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan bawa kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di Kantor KPU Kota Mataram. dengan datang langsung ke informan untuk menanyakan kepada para informan terkait beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak KPU Kota Mataram.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan diamana peneliti melakukan pengumpulan data yang menghasilkan suatu catatan penting yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Tujuan Dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan.

3.6. Teknik Analisa Data

usaha agardapat mengurai masalah dan fokus kajian menjadi bagian-bagian (*Idecomposittion*) adalah metode dari teknik Analaisis data dengan harapan susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai nampak begitu jelas

beserta lebih terang di tangkap definisinya atau lebih jernih dalam menentukan duduk perkaranya.

Dalam mengarahkan peneliti agar mendapatkan hasil yang tak terduga maka perlu untuk memakai teknik analisis data kualitatif. karena Data kualitatif mampu membantu peneliti agar dapat melangkah lebih jauh dari kerangka kerja.

Menurut Bogdan & Biklen dalam buku (Lexy J. Moleong) analisis data kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan dengan cara jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilah nya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. (Moleong L.J;2012).

berikutnya analisis data menurut Nasution (1992) yakni :

- a) **Reduksi Data** : yaitu teknik dari analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa agar kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.
- b) **Penyajian Data** : Penyajian data merupakan cara dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data yaitu aktivitas ketika kumpulan informasi dapat untuk disusun, sehingga ada kemungkinan akan adanya penarikan

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

- c) **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi** : Penarikan kesimpulan adalah teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Adapun teknik analisa dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan Data : yaitu data yang berasal dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum di olah Oleh Peneliti
2. Reduksi data dengan cara membuat suatu abstraksi untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti.
3. Identifikasi dan kategori: Dalam bagian ini peneliti dapat melakukan identifikasi dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini pula dilakukan modifikasi terhadap data dan informasi yang telah diperoleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang selanjutnya merumuskan kesimpulan secara rinci Zuriah (2007). Menyajikan data dalam bentuk yang sederhana sesuai dengan kriteria dan klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian agar mudah dipahami.